



LAPORAN
KUNJUNGAN KERJA KOMISI X DPR RI
KE KABUPATEN DELI SERDANG SUMATERA UTARA
PADA RESES MASA PERSIDANGAN III TAHUN SIDANG 2020-2021
TANGGAL 15-19 FEBRUARI 2021

I. PENDAHULUAN

Komisi X DPR RI pada Masa Sidang III 2020-2021 memutuskan melalui Rapat Intern tanggal 11 Januari 2021, akan melakukan Kunjungan Kerja Reses pada Masa Persidangan III Tahun Sidang 2020-2021 ke 3 (tiga) provinsi, yaitu Sumatera Utara, Sumatera Barat dan Sumatera Selatan.

1. Dasar Hukum

- a. UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 20, 20A, Pasal 21 dan Pasal 23 tentang tugas DPR-RI terhadap legislasi, anggaran, dan pengawasan.
- b. UU No. 42 Tahun 2014 tentang Perubahan UU No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD Pasal 69, 70, 71, 72, 73 tentang tugas DPR RI terhadap legislasi, anggaran, dan pengawasan, serta Pasal 98 ayat (4) huruf f.
- c. Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Pasal 4, 5 dan 6 tentang Fungsi, Wewenang, Dan Tugas DPR RI Pasal 59 ayat (4) tentang Tugas Komisi Di Bidang Pengawasan Pasal 60 ayat (3) huruf f tentang Pelaksanaan Kunjungan Kerja Komisi DPR RI.
- d. Keputusan Pimpinan DPR RI tentang penugasan kepada anggota Komisi I sampai dengan Komisi XI dan Badan Legislasi DPR-RI untuk melakukan Kunjungan Kerja Berkelompok Masa Reses pada Masa Persidangan III Tahun Sidang 2020-2021.
- e. Keputusan Rapat Intern Komisi X DPR RI tanggal 11 Januari 2021 tentang rencana kunjungan kerja Komisi X DPR RI masa reses Masa Persidangan III Tahun Sidang 2020-2021 ke Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara, Provinsi Sumatera Barat dan, Provinsi Sulawesi Selatan.
- f. Surat Tugas No.PW/01440/II/2021 tanggal 2 Februari 2021 perihal Kunjungan Kerja Komisi X DPR RI ke Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara dalam rangka kunjungan kerja Reses Masa Persidangan III Tahun Sidang 2020-2021 selama 5 (lima) hari terhitung tanggal 15 s/d 19 Februari 2021.

2. Maksud dan Tujuan

Mendapatkan penjelasan secara langsung dari pejabat daerah mengenai implementasi UU dan kebijakan yang dilakukan Pemerintah dan Pemerintah Daerah, menggali dan menyerap aspirasi dari daerah, dan mendapatkan masukan berupa data-data faktual dan berbagai persoalan tentang pelaksanaan kebijakan pembangunan nasional dalam bidang pendidikan dan kebudayaan, pariwisata dan ekonomi kreatif, pemuda dan olahraga, dan perpustakaan di provinsi yang dikunjungi, terlebih saat ini dunia dan secara khusus Indonesia sedang mengalami Pandemi *Corona Virus Disease* (COVID) 19, dan berimbas ke semua sektor tersebut, serta untuk mengetahui bagaimana perkembangan yang terjadi setelah memasuki masa kenormalan baru (*new normal*); di daerah yang dikunjungi.

3. Tim Kunjungan Kerja

Tim Kunjungan Kerja Komisi X DPR RI pada Masa Reses Persidangan III Tahun Sidang 2020-2021 ke Sumatera Utara dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi X DPR RI Dr. Ir. Hetifah Sjaifudian, MPP (F-PG) dan dihadiri pula oleh para pejabat dari mitra kerja Komisi X yaitu Drs. Purwadi Sutanto, M.Si. selaku Direktur SMA Kemendikbud RI, Dr. Muhammad Hasbi selaku Direktur PAUD Kemendikbud RI, Drs. Chandra Bhakti, M.Si selaku Deputy Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Kemenpora RI, Wisnu Bawa Tarunajaya Deputy Bidang Sumber Daya dan Kelembagaan Kemenparekraf/Baparekraf RI, dan Deni Kurniadi Deputy Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan Perpusnas RI. Tim didampingi oleh Sekretariat dan Tenaga Ahli Komisi X DPR RI serta Tim Pemberitaan Sekretariat Jenderal DPR RI.

4. Agenda Kunjungan Kerja

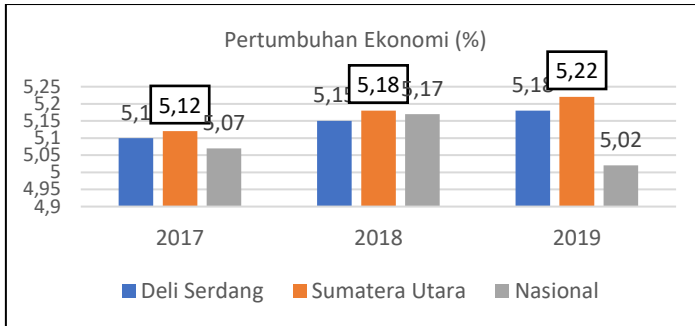
- Pertemuan dengan Bupati Deli Serdang Sumatera Utara, H.Ashari Tambunan.
- Gubernur Sumatera Utara, Jend (purn) Edy Rahmayadi
- Pimpinan DPRD Kabupaten Deli Serdang, Zaki Syahri
- Kepala Bappeda Kabupaten Deli Serdang, Ir. Remus Hasiholan Pardede, M.Si.
- Ka. Dinas Pendidikan Kabupaten Deli Serdang, H. Timur Tumanggor. S. Sos., M.AP.
- Ka. Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Deli Serdang, Ir. H. Khoirum Rijal, ST., M.AP.
- Ka. Dinas Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Kabupaten Deli Serdang, Drs. Misran Sihaloho.
- Kepala LPMP Provinsi Sumatera Utara;
- Pimpinan Organisasi Profesi Guru Kabupaten Deli Serdang;
- Pimpinan Organisasi Kepemudaan Kabupaten Deli Serdang;
- Ketua Kwarda Gerakan Pramuka Kabupaten Deli Serdang;
- Ketua KONIDA Kabupaten Deli Serdang;
- Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Deli Serdang;
- Ketua Dewan Kesenian Kabupaten Deli Serdang;
- Lembaga dan organisasi pariwisata, pemilik destinasi wisata, dan pelaku Ekonomi Kreatif Kabupaten Deli Serdang;
- Budayawan dan Seniman di Kabupaten Deli Serdang;

II. TEMUAN DATA

A. Umum

Kebijakan pembangunan Kabupaten Deli Serdang untuk TA 2021 diarahkan untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan arah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2019-2024.

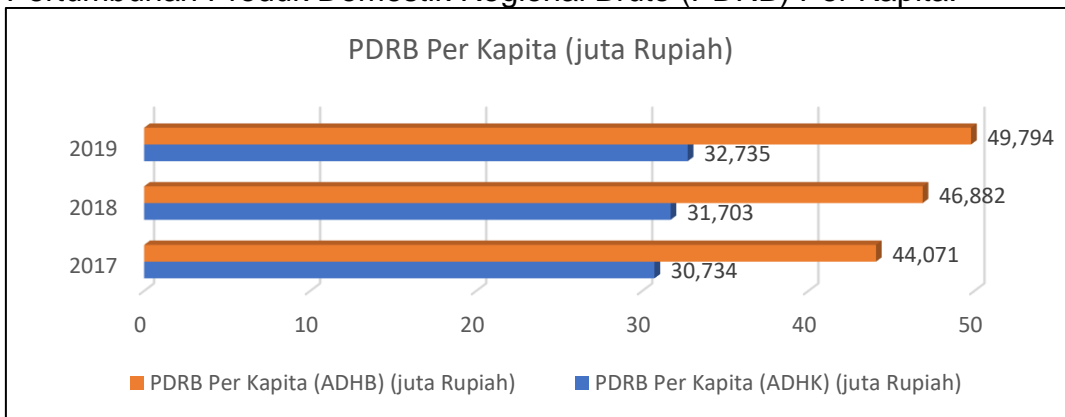
Pencapaian pembangunan di bidang ekonomi:



Sumber: Bahan Paparan Bupati Deli Serdang

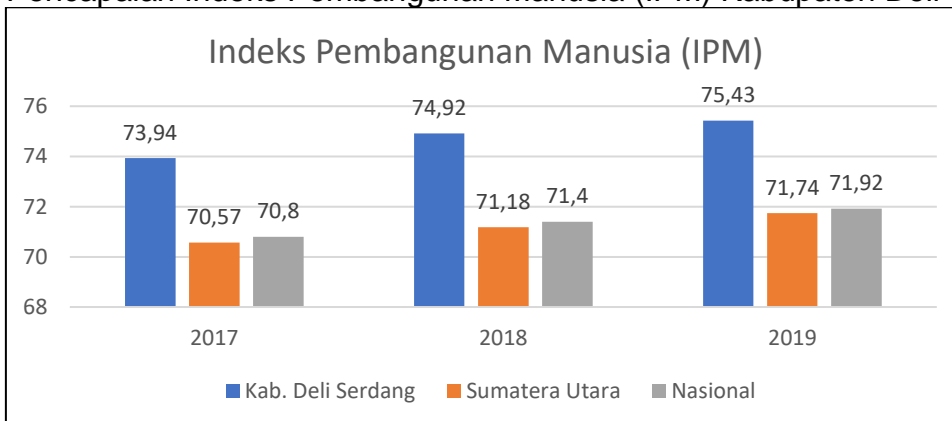
Rata-rata pertumbuhan ekonomi Kabupaten Deli Serdang dalam tiga tahun terakhir 0,78% berdasarkan grafik pertumbuhan ekonomi.

Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Per Kapita:



Sumber: Bahan Paparan Bupati Deli Serdang

Pencapaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Deli Serdang:



Sumber: Bahan Paparan Bupati Deli Serdang

Dalam kurun waktu tiga tahun terakhir rata-rata capaian IPM di Kabupaten Deli Serdang adalah 74.76. IPM dibentuk oleh 3 (tiga) dimensi dasar yaitu lama hidup (umur panjang) dan hidup sehat, pengetahuan (pendidikan), dan standar hidup layak (ekonomi). Capaian IPM Kabupaten Deli Serdang 75.43 pada Tahun 2019 tertinggi kedua setelah Kabupaten Binjai 75.89 diantara kabupaten/kota di kawasan pantai Timur Sumatera Utara.

Kota Medan tercatat sebagai pusat penyebaran Covid-19, Kabupaten Deli Serdang letaknya paling dekat dengan pusat penyebaran, maka berikut disampaikan langkah-langkah yang telah diambil sebagai upaya pencegahan, antara lain dengan menerbitkan dan mensosialisasikan Peraturan Bupati Nomor 77 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Pencegahan dan Pengendalian Covid-19. Terhadap kegiatan sektor pariwisata, budaya, ekraf, pemuda, olahraga dan perpustakaan, Pemkab Deli Serdang memberikan rekomendasi dan kemudahan, dengan tetap mengikuti protokol kesehatan yang ketat. Sedangkan untuk rencana pembukaan sekolah pada tahun pelajaran 2021, Pemkab Deli Serdang dalam posisi menunggu kebijakan Gugus Tugas / Satuan Tugas Covid-19 Pusat dan Provinsi, dan satuan tugas kabupaten telah membahas dan menghimbau kepada para Kepala Sekolah dalam proses belajar tatap muka tetap melaksanakan protokol kesehatan dengan ketat dan disiplin. Kebijakan Gugus Tugas atau Satuan Tugas COVID-19 Kabupaten Deli Serdang dalam mengendalikan penyebaran COVID-19 di Kabupaten Deli Serdang:

- 1) Melakukan sosialisasi pelaksanaan penerapan 3M (memakai masker, mencuci tangan pakai sabun, dan menjaga jarak);
- 2) Mempersiapkan dan membagi masker kepada masyarakat;
- 3) Melaksanakan 3T (*Testing, Tracing, dan Treatment*) di seluruh wilayah Kabupaten Deli Serdang;
- 4) Menerbitkan dan mensosialisasikan Peraturan Bupati Nomor 77 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakkan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Pencegahan dan Pengendalian Covid-19;
- 5) Melakukan Operasi Penerapan Peraturan Bupati Nomor 77 Tahun 2020 kepada masyarakat;
- 6) Pembentukan Rumah Sakit Lapangan, Tempat Isolasi Terfokus dan Tempat Pemakaman Khusus (TPK) COVID-19;
- 7) *Update* Data dan Pelaporan harian kepada Gugus Tugas / Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Provinsi Sumatera Utara melalui Posko Terpadu Gugus Tugas / Satuan Tugas Kabupaten Deli Serdang.

B. Bidang Pendidikan

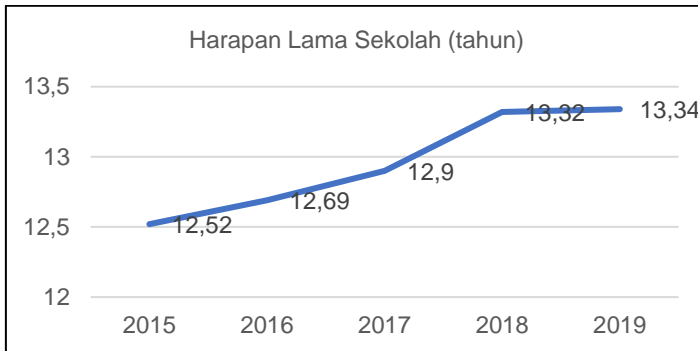
Identifikasi Data dan Informasi Dikdasmen

No.	Jumlah Satuan Pendidikan	Tahun (unit)				
		2015	2016	2017	2018	2019
Sekolah Negeri						
1.	TK	21	24	28	29	31
2.	SD	590	583	583	582	582
3.	SMP	63	65	63	63	63
Sekolah Swasta						
1.	TK	264	405	420	522	531
2.	SD	228	246	287	367	300
3.	SMP	199	205	231	238	238

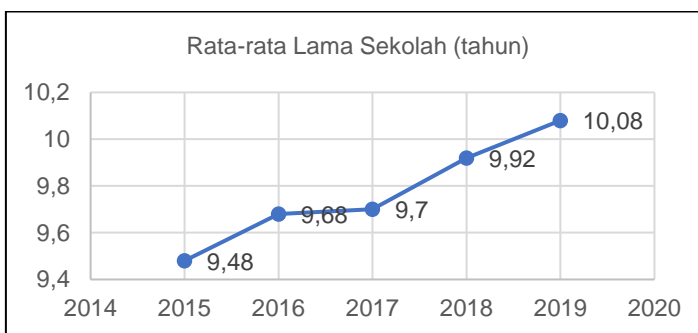
Sumber: Bahan Paparan Bupati Deli Serdang

Jenjang Pendidikan	2015	2016	2017	2018	2019
APM					
SD/MI	98,81	98,54	95,73	94,34	95,03
SMP/MTs	79,95	69,17	72,52	71,00	70,82
APK					
SD/MI	111,89	113,28	106,62	112,82	104,03
SMP/MTs	90,63	74,88	84,47	87,07	89,59

Sumber: Bahan Paparan Bupati Deli Serdang



Sumber: Bahan Paparan Bupati Deli Serdang



Sumber: Bahan Paparan Bupati Deli Serdang

Kebijakan Pendidikan Pada Masa Pandemi Covid-19 dan Pelaksanaan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ)

Pembelajaran di masa Pandemi Covid 19 dilaksanakan melalui berbagai strategi, yaitu :

1. Pembelajaran Jarak Jauh (PBJ) atau Daring (dalam jaringan) dengan memanfaatkan Teknologi Informasi Komunikasi (TIK), Televisi Edukasi, Aplikasi Rumah Belajar, *google classroom*, *WhatsApp*, *zoom meeting* dsb. Model pembelajaran ini dilaksanakan bagi siswa yang memiliki telepon genggam dengan sistem operasi *Android* yang cukup memadai.
2. Melalui Luring (di luar jaringan) di mana orang tua siswa mengambil Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD) yang disiapkan oleh guru, kemudian siswa mengerjakan di rumah, satu atau dua minggu ke depan diantar kembali ke sekolah. Model ini dilaksanakan bagi siswa yang tidak dapat mengikuti daring karena tidak memiliki telepon genggam dengan sistem operasi *Android* atau siswa yang berada di daerah yang tidak memiliki akses internet.
3. *Home Visit* atau melalui kunjungan rumah dilaksanakan bagi siswa yang tidak melaksanakan daring atau siswa yang diketahui tidak mengerjakan latihan yang

diberikan guru. Guru melakukan *home visit* untuk mengetahui mengapa siswa tidak mengerjakan latihan yang diberikan sambil melakukan pembinaan dan memberi motivasi pada siswa. Di samping itu pada siswa TK dan SD kelas rendah (I dan II) beberapa sekolah melaksanakan *home visit* dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan.

PJJ di Kabupaten Deli Serdang dapat diimplementasikan dengan baik, walaupun menghadapi kendala dan permasalahan, antara lain:

Moda Belajar (PJJ)	Kendala	Permasalahan	Solusi
Daring	Banyak peserta didik tidak memiliki HP Android	Pembelajaran tidak dapat diterima oleh seluruh peserta didik.	1. Peserta didik belajar melalui moda luring. 2. Pembelajaran melalui siaran TVRI dan RRI
	Tidak memiliki kuota/paket	Tidak dapat mengikuti pembelajaran online	Bantuan kuota internet dari Kemdikbud dan bantuan dari satuan pendidikan.
	Peserta didik bosan	Materi pelajaran tidak dapat terserap oleh peserta didik	1. Pendidik menyampaikan pelajaran secara bervariasi, mudah, menarik dan menantang 2. Memvariasikan kompetensi spiritual, social, pengetahuan dan ketrampilan
Luring	Perlu waktu bagi orang tua untuk mengambil dan mengembalikan lembar kerja ke satuan pendidikan/pendidik	Orang tua yang bekerja tidak dapat mengambil dan mengembailkan lkpd.	Guru melakukan kunjungan rumah/ <i>home visit</i> untuk menyampaikan lkpd,
<i>Home Visit</i>	Jarak rumah peserta didik yang berjauhan	Tidak dapat dikunjungi secara rutin.	Susun jadwal kunjungan
	Perlu transportasi		Bantuan biaya transportasi bagi pendidik yang melakukan home visit.

Masukan terhadap kebijakan PJJ dan pembelajaran selama masa Pandemi COVID-19, antara lain:

1. Kemendikbud memperbanyak pelatihan IT atau pelatihan mengelola pembelajaran di masa pandemi, bagi guru agar semakin terampil menggunakan pembelajaran daring.

2. Menyediakan atau membangun aplikasi pembelajaran yang dapat dimanfaatkan guru pada situasi Pandemi Covid-19 ini, dalam bentuk pembelajaran daring.
3. Membolehkan sekolah membeli Lembar Kerja Siswa (LKS) agar pembelajaran lebih terarah, guru terbantu menyediakan LKPD, siswa mendapat materi ajar, dan siswa dapat mengukur pemahamannya dengan mengerjakan latihan-latihan.
4. Melanjutkan program bantuan internet gratis bagi siswa dan guru, serta penambahan kuota PIP.
5. Mensosialisasikan pendidikan keluarga, untuk membekali orang tua mendampingi anak belajar di masa pandemi ini.

Rencana Pembelajaran Pada Masa Era New Normal

Pemkab Deli Serdang akan Melakukan *recofusing* anggaran yang digunakan untuk menghadapi pandemi Covid 19 baik dari dana APBD maupun dari dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Recofusing anggaran tersebut untuk menyiapkan:

1. satuan pendidikan untuk melakukan kegiatan pembelajaran era new normal, yaitu menyediakan fasilitas protokoler kesehatan di setiap sekolah seperti melakukan disinfektan lingkungan sekolah secara berkala, menyediakan wastafel dengan sumber air yang mengalir, thermogun dalam jumlah yang proporsional, pengadaan masker, membangun sumur bor, dsb.
2. sosialisasi pencegahan covid-19 melalui spanduk/*x-banner*.
3. pengaturan siswa belajar di sekolah dan belajar dari rumah secara bergantian untuk menghindari kerumunan.
4. pengaturan jarak dengan prinsip *social distancing* dan *physical distancing*.
5. melaksanakan pelatihan peningkatan kompetensi guru secara daring untuk pemanfaatan IT dalam pembelajaran, sekaligus menyampaikan berbagai kebijakan pembelajaran di masa pandemi Covid-19.

Pemerintah Kabupaten Deli Serdang mendukung kebijakan Merdeka Belajar yang dikeluarkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan karena memberikan kebebasan bagi siswa untuk belajar mandiri dan guru dalam berinovasi mewujudkan pembelajaran yang berkualitas pada setiap ruang-ruang kelas.

Namun beberapa program dan kegiatan Kemendikbud RI perlu diperbaiki dan disempurnakan, yaitu:

1. Program kemitraan dengan (Keluarga) masyarakat, kiranya kemdikbud memprogramkan sekolah dan keluarga dapat bersinergi untuk meningkatkan mutu kompetensi peserta didik di sekolah, sekolah adalah sahabat keluarga.
2. Penguatan Pendidikan Karakter melalui kegiatan intrakurikler, ko kurikuler dan ekstra kurikuler.

Evaluasi Kebijakan PIP, BOS, DAK, Kurikulum, PPDB, PKLK, dan Pendidikan Vokasi

1. Program Indonesia Pintar (PIP) sangat bermanfaat bagi siswa atau masyarakat yang tidak mampu untuk tetap dapat menyekolahkan anaknya. Hal ini sangat mendukung untuk meningkatkan akses masyarakat mendapatkan Pendidikan sekaligus mengatasi kerawanan anak untuk tidak putus sekolah.

Ada beberapa evaluasi terhadap PIP :

- a. Penerima PIP yang tidak tepat sasaran karena masih banyak siswa yang miskin dan rentan putus sekolah tidak mendapat PIP.
- b. Calon peserta didik yang sudah diusulkan di Dapodik tidak menerima PIP.
- c. Banyak KIP ATM yang belum tersalurkan ke sekolah / peserta didik.

Saran:

- a. Mohon kiranya Kemdikbud memberikan tambahan kuota penerima PIP tahun berikutnya yang berasal dari usulan verifikasi Dinas.
- b. Batas waktu verifikasi pengusulan PIP tidak singkat, sehingga operator PIP Dinas lebih memiliki waktu, sehingga semua calon terverifikasi dengan baik.
- c. Mohon kiranya Kementerian menghimbau BRI Pusat untuk mengkoordinir BRI Cabang yang ada di Kabupaten / Kota dan Kecamatan supaya merealisasikan KIP ATM nya itu, diserahkan kepada siswa penerima PIP, bersamaan dengan buku tabungannya, dan jangan ada yang ditunda penyaluran KIP ATM nya.

2. Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

Dana BOS sangat bermanfaat untuk mendukung operasional sekolah sekaligus untuk meningkatkan akses dan mutu layanan Pendidikan pada setiap jenjang Pendidikan di Indonesia untuk mewujudkan Sumber Daya Manusia Indonesia yang berkualitas. Pemerintah Kabupaten Deli Serdang mengapresiasi episode kebijakan Merdeka Belajar terkait dengan mekanisme penyaluran dana BOS yang dahulunya dari Kementerian Keuangan ke Pemerintah Provinsi, dari Pemerintah Provinsi ke sekolah. Menjadi dari dari Kementerian Keuangan langsung ke rekening sekolah. Hal ini dapat mempercepat dana BOS diterima sekolah dan sangat membantu sekolah dalam melaksanakan operasional sekolah.

- a. Penentuan pagu dana BOS yang murni dihitung dari jumlah siswa sangat tidak menguntungkan bagi siswa yang jumlah muridnya kecil. Jika jumlah siswa kecil (umpamanya di bawah 50 orang) maka dana BOS yang diterima sekolah juga kecil. Hal ini menyulitkan sekolah untuk melaksanakan operasional sekolah, pemeliharaan gedung, pembayaran honor guru dan kegiatan operasional lainnya. Apalagi jika di suatu sekolah lebih banyak guru honorinya, atau semua gurunya honor semua, yang PNS hanya kepala sekolah.

Saran: Ditetapkan standar pembiayaan minimal untuk satu sekolah dengan rombongan kecil, umpama 6 Rombel untuk SD. Pemerintah harus menetapkan terlebih dahulu, berapa standar pembiayaan gedung sekolah dalam satu tahun. Umpama satu rombongan Rp. 10 juta, jadi 6 kali 10 juta = 60 Juta. Setelah itu baru dikalikan dengan jumlah siswa sesuai yang telah ditetapkan pemerintah per siswa. Dengan perhitungan seperti ini, sekolah kecil tetap dapat melakukan pemeliharaan gedung sekolah dan mobiler kelas dari dana BOS. Hal ini berdampak pada peningkatan performan sekolah dan kualitas pembelajaran di sekolah.

- b. Masalah gaji guru yang bersumber dari dana BOS belum memadai, apalagi pada sekolah yang muridnya kecil, guru honorinya banyak, bahkan pada sekolah seluruh gurunya, honor semua, karena yang PNS tinggal hanya kepala sekolah. Masih dijumpai guru yang kualifikasi Pendidikan S1, masa

kerja 10 tahun, gajinya di bawah 300 ribu per bulan. Hal ini disamping tidak berpihak ke nasib guru, menyebabkan guru tidak fokus melaksanakan tugasnya, karena harus mencari tambahan penghasilan lain.

Saran: Sistem penggajian guru yang mengajar di Sekolah Negeri maupun Swasta ditetapkan melalui kebijakan nasional, yang ditetapkan secara standar atau mengikuti Upah Minimum Regional (UMR) yang ditampung dalam Dana Alokasi Umum (DAU), atau melalui kebijakan lain yang dapat meningkatkan kesejahteraan guru. Harus diciptakan kebijakan Merdeka Belajar tahap berikutnya, yaitu Merdeka Belajar Peningkatkan Kesejahteraan Guru Honorer. Guru adalah profesi yang mulia, melakukan tugas yang mulia, jika memungkinkan Pemerintah mengeluarkan kebijakan yang signifikan untuk meningkatkan kesejahteraan guru.

- c. Pembelajaran di masa pandemi Covid – 19 ini yang sebagian besar dilaksanan secara daring lebih banyak memberikan latihan pada siswa. Siswa mengerjakan Lembaran Kerja Peserta Didik (LKPD) atau tugas-tugas yang dibuat oleh guru, untuk dikerjakan oleh siswa di rumah. Pemberian Lembar Kerja Siswa (LKS) yang memuat ringkasan materi pelajaran dan tugas-tugas yang harus dikerjakan siswa, sangat tepat untuk belajar pada situasi Covid – 19 ini. Tetapi dalam juknis BOS, sekolah dilarang membeli Buku Lembar Kerja Siswa. Mohon kiranya pengadaan LKS yang dilarang dalam juknis BOS ditinjau Kembali, karena LKS sangat membantu tugas guru dan siswa belajar di masa pandemi ini.
3. DAK adalah dana yang bersumber dari Pendapatan APBN, yang di Alokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu dan mendanai kegiatan Khusus untuk menungjang Pelaksanaan Program wajib Belajar pendidikan 9 Tahun yang Bermutu. Pemerintah Kabupaten Deli Serdang mengapresiasi adanya dana DAK yang dapat digunakan untuk meningkatkan mutu penyelenggaraan Pendidikan.
Sekolah Sasaran penerima bantuan DAK Fisik di Kabupaten Deli Serdang dalam melaksanakan kegiatan dari mulai tahapan pencairan dana I, II, dan III sudah sesuai mekanisme, dengan memperhatikan waktu dan jadwal penyelesaian kegiatan yang disertai dengan laporan progres kemajuan pekerjaan, sehingga pada pelaksanaannya tidak berdampak kepada progres pencairan di tahapan berikutnya.
DAK Fisik Pendidikan Tahun 2020 di Kabupaten Deli Serdang pelaksanaannya sudah berjalan dengan baik mengacu kepada petunjuk teknis dan petunjuk operasional yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan yang pelaksanaannya dikerjakan secara swakelola oleh pihak sekolah yang diawali pembentukan Panitia Pembangunan Sekolah (P2S) dengan melibatkan unsur masyarakat.
Sedangkan DAK Fisik Tahun 2021 dilaksanakan melalui E-Tendering yang melibatkan pihak ke tiga sebagai pelaksana kegiatan. Pelaksanaan baik secara swakelola dan secara *E-Tendering*, Dinas Pendidikan Kabupaten Deli Serdang melihatnya tidak berdampak negative bagi sekolah sasaran penerima bantuan sejauh pelaksanaan sesuai dengan mekanisme dan peraturan yang sudah ditetapkan.

Secara umum mekanisme penyaluran dana DAK sudah baik, hanya saja bila memungkinkan penetapan sekolah penerima DAK itu dilakukan secara proporsional dengan mempertimbangkan potensi Pendidikan, seperti jumlah sekolah, jumlah siswa, jumlah guru, dan tingkat kerusakan sarana Pendidikan yang ada di setiap kabupaten / Kota.

4. Kurikulum yang digunakan di Dinas Pendidikan Kabupaten Deli Serdang kurikulum nasional 2013. Pada masa darurat pandemic covid-19, satuan pendidikan di Dinas Pendidikan Kabupaten Deli Serdang menggunakan Kurikulum Khusus/Kurikulum Darurat, sesuai anjuran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Secara substansi, Kurikulum Nasional 2013 sudah baik karena pelaksanaan pembelajaran terintegrasi dengan tuntutan kecakapan abad XXI, yaitu: (1) Kecakapan Berpikir Kritis dan Pemecahan Masalah (*Critical Thinking and Problem Solving Skill*); (2) Kecakapan Berkomunikasi (*Communication Skills*); (3) Kecakapan Kreatifitas dan Inovasi (*Creativity and Innovation*); dan (4) Kecakapan Kolaborasi (*Collaboration*).

Pelaksanaan pembelajaran menggunakan pendekatan saintifik, kontekstual dan pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, efektif dan menyenangkan. Pendidikan yang mengintegrasikan antara kecakapan pengetahuan, keterampilan, dan sikap, serta penguasaan terhadap Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). Kecakapan yang dibutuhkan dalam dunia pendidikan pada Abad 21 adalah keterampilan berpikir lebih tinggi *Higher Order Thinking Skills* (HOTS). Hanya saja perlu diperbanyak pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan kompetensi guru dalam memahami kurikulum dan mengimplementasikan pembelajaran di ruang kelas, sehingga pembelajaran menjadi lebih berkualitas.

5. Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Kabupaten Deli Serdang secara umum sudah dilaksanakan dengan baik, program ini mengatasi berbagai masalah yang selama ini ada, diantaranya zonasi dan siswa yang tidak mampu. Pelaksanaan PPDB untuk jenjang SD dilaksanakan secara *offline* dan untuk jenjang SMP secara *online* dengan prinsip:
 - a. Nondiskriminatif, artinya setiap warga negara yang berusia sekolah dapat mengikuti program pendidikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia tanpa membedakan suku, daerah asal, agama, golongan, dan status sosial (kondisi ekonomi);
 - b. Obyektif, artinya bahwa Penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru, dilaksanakan hanya berdasar peraturan perundangan dan tanpa dipengaruhi oleh faktor-faktor di luar ketentuan yang telah ditetapkan.
 - c. Transparan, artinya bahwa PPDB bersifat terbuka dan dapat diketahui oleh masyarakat termasuk orang tua/wali peserta didik baru, untuk menghindari penyimpangan – penyimpangan yang mungkin terjadi.
 - d. Akuntabel, artinya bahwa PPDB dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, baik prosedur maupun hasilnya.

PPDB dilaksanakan melalui jalur: (i) Prestasi 30 % dari daya tampung; (ii) Afirmasi 15 % dari daya tampung; (iii) Perpindahan tugas orang tua dan anak guru dilaksanakan 5 % dari daya tampung; (iv) Zonasi 50 % dari daya tampung.

Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada Dinas Pendidikan Kabupaten Deli Serdang untuk jenjang SMP dilaksanakan secara online, untuk memberikan akses dan kemudahan sekaligus transparansi penerimaan siswa baru kepada masyarakat. Penerimaan Peserta Didik Baru secara online sudah dilaksanakan sejak tahun 2012 di Kabupaten Deli Serdang.

PPDB Online di Kabupaten Deli Serdang dilaksanakan mengacu kepada Juknis PPDB yang ditetapkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan kriteria seleksi sebagai berikut :

- 1) Kuota Zonasi = 50 % dari daya tampung
- 2) Jalur Afirmasi = 15 % dari daya tampung
- 3) Jalur Prestasi = 30 % dari daya tampung
- 4) Jalur Perpindahan Orang Tua dan anak guru = 5 % dari daya tampung.

Kendala yang dihadapi :

- 1) Kabupaten Deli Serdang dengan wilayah geografis yang cukup luas dengan topografi yang bervariasi ada dataran tinggi dan dataran rendah sehingga tidak semua daerah ada jaringan internet.
- 2) Kurangnya pengetahuan dan keterampilan orang tua menggunakan aplikasi internet, walaupun penerimaan siswa baru sudah dilaksanakan secara online, mereka masih datang juga ke sekolah mendaftarkan anaknya. Beberapa orang tua meminta bantuan pada operator Warnet, sehingga mengeluarkan biaya tambahan.
- 3) Masalah Jaringan Internet. Pada daerah yang signal internetnya lemah, orang tua harus berpindah ke daerah atau kecamatan lain yang akses internetnya kuat, sehingga menghambat proses pendaftaran. Di samping itu, walaupun sekolah itu berada di daerah perkotaan, pada waktu-waktu tertentu, jaringan internet tidak stabil sehingga mengganggu proses PPDB.

Saran: Kementerian Informasi dan Komunikasi menyediakan akses dan jaringan internet di sekolah untuk mendukung PPDB Online, Ujian online bagi siswa dan guru serta operator dapodik. Minimal di sekitar sekolah harus ada signal internet. Seperti PLN yang menyediakan jaringan listrik di sekitar pemukiman penduduk. Jadi seluru sekolah terkoneksi dengan jaringan internet.

6. Pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus di wilayah Kabupaten Deli Serdang dilaksanakan dalam bentuk Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB) dan Sekolah Luar Biasa (SLB), yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi. Tetapi Kementerian Pendidikan dan kebudayaan juga memperkenalkan sekolah Inklusi, yaitu sekolah formal yang menampung anak berkebutuhan khusus. Mengingat banyaknya anak yang berkebutuhan khusus yang tidak terdeteksi, (dimana orang tua malu atau merasa aib memiliki anak berkebutuhan khusus, dan malu menyekolahkan anaknya di SDLB /SLB, Dinas Pendidikan Kabupaten Deli Serdang mengusulkan Kemdikbud membuat kebijakan adanya sekolah inklusi di setiap kecamatan, sekaligus menyediakan sarana dan guru sesuai dengan kekhususan yang dilaksanakan.
7. Dinas Pendidikan Kabupaten Deli Serdang tidak melaksanakan Pendidikan Vokasi, karena bukan wewenangnya. Tetapi melaksanakan Life Skill (Pendidikan kecakapan hidup) bagi siswa putus sekolah atau masyarakat melalui Pendidikan Nonformal dalam bentuk Kursus-Kursus melalui Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).

Peta Jalan Pendidikan Indonesia 2020-2035

Peta Jalan Pendidikan memuat: (i) Trend Global dan masa depan pembelajaran, (ii) Gambaran Pendidikan Indonesia dan tantangannya, (iii) pandemi Covid-19 mendorong perubahan sosial, (iv) visi Pendidikan 2035, (v) target merdeka belajar 15 tahun ke depan, (vi) peta jalan peningkatan sekolah, dan berbagai materi penting lainnya, sangat tepat untuk dipahami pemangku kebijakan di bidang pendidikan. Peta Jalan Pendidikan 2020-2035 berisi evaluasi capaian kinerja pembangunan pendidikan, trend perkembangan pendidikan di masa depan dan arah yang akan dicapai pembangunan pendidikan nasional, merupakan informasi yang berharga karena menampilkan potret pendidikan nasional.

Dinas Pendidikan Kabupaten Deli Serdang belum pernah diundang mengikuti sosialisasi Peta Jalan Pendidikan Kemdikbud dan juga belum pernah melakukan sosialisasi kepada jajarannya. Karena itu memohon kiranya Kemdikbud mensosialisasikan konsep yang hebat ini, kepada pemangku kepentingan dan kepala dinas Pendidikan beserta seluruh jajarannya.

Data yang disajikan dalam Peta Jalan Pendidikan Kemdikbud RI sudah cukup lengkap dan baik, masukan yang diberikan adalah :

1. Road Map Peta Jalan Pendidikan Kemdikbud bila boleh dijadikan sebagai visi negara, sehingga walaupun pemerintahan sekarang berganti, rancangan ini akan tetap dilaksanakan, dan harus menjadi rujukan pembangunan bidang Pendidikan di tingkat pusat dan daerah.
2. Belum ada dasar hukum atau kajian akademik tentang Peta Jalan Pendidikan Kemdikbud. Ini sangat penting sebagai kerangka berfikir dan filosofis terhadap grand desain yang telah disusun.
3. Peta Jalan Pendidikan dalam pemenuhan frastuktur pendidikan harus memperhatikan kondisi geografis Indonesia, potensi keunggulan dan kelemahan daerah. Tidak bisa diberlakukan secara seragam.
4. Belum terlihat adanya layanan untuk anak berkebutuhan khusus, masalah kekurangan guru dan kesejahteraan guru.
5. Mengutamakan peran pendidikan keluarga, pendidikan budaya, dan masyarakat dalam proses pembentukan karakter Pendidikan Anak Usia Dini, untuk mencapai terhadap keenam kompetensi yang telah dibentuk dalam Peta Jalan Pendidikan (berakhlak mulia, mandiri, kebinekaan global, gotong royong, kreatif, dan bernalar kritis).

Masukan Revisi UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas)

Secara umum UU Sisdiknas sudah mengakomodir kebutuhan dan penyelenggaraan Pendidikan di Indonesia untuk mewujudkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas. Beberapa saran untuk dipertimbangkan terkait revisi UU Sisdiknas, antara lain:

1. Pasal yang menyatakan sertifikasi pendidik yang hanya digunakan untuk Guru Formal supaya disesuaikan atau diubah sehingga Guru Pendidikan Nonformal seperti Tutor PAUD, Kelompok Bermain (KOBBER) juga mendapatkan hak sertifikasi. Selama ini guru PAUD Non Formal dan Kober sering mengeluhkan nasib mereka yang tidak mendapatkan sertifikasi pendidik, padahal tugas yang mereka lakukan sama persis dengan Guru TK, Namanya saja yang berbeda, mereka dinamakan Tutor sedang guru formal Namanya TK. Di samping itu, secara nasional jumlah guru PAUD Non Formal jauh lebih banyak dari guru PAUD Formal. Akibatnya kesejahteraan yang diterima guru PAUD Non Formal sangat rendah. Untuk menghibur diri, guru PAUD Non Formal biasanya menganggap gaji yang mereka

terima “SAJUTA” : Sabar, Jujur dan Tawakal” atau SAJUTA SETENGAH : yaitu Sabar, Jujur, Tawakal, setiap Tengah Bulan Terengah-Engah.

2. Pasal 3: Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Masukan/Usulan: Tujuan pendidikan nasional selain yang tercantum dalam pasal 3 di atas ditambah : cinta bangsa dan tanah air. (Usulan ini didasari lunturnya rasa cinta bangsa dan tanah air generasi muda)

3. Pasal 37 ayat (1). Kurikulum pendidikan dasar dan menengah wajib memuat
 - a. Pendidikan agama
 - b. Pendidikan kewarganegaraan

Masukan/usulan: Pasal 37 ayat 1 point b diubah menjadi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. (Usulan ini didasari perlunya penegasan pendidikan Pancasila, agar terjadi penguatan pendidikan dan pengamalan Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, untuk mewujudkan Pelajar Pancasila.

C. Bidang Kebudayaan

Identifikasi Data dan Informasi Pariwisata

1. Beberapa langkah upaya Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Deli Serdang untuk memastikan kegiatan bidang kebudayaan selama masa pandemi COVID-19 tetap berjalan sebagai berikut:
 - a. Membina dan memfasilitasi kegiatan kebudayaan yang dilakukan para pegiat seni budaya, diantaranya ikut serta dalam festival seni budaya 6 Ka Ta Majalengka dari Kementerian Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif secara Virtual.
 - b. Membina dan memonitoring pelatihan untuk mengikuti festival kesenian karawitan terhadap lembaga kebudayaan yang ada di Kabupaten Deli Serdang.
 - c. Membina pada lembaga kebudayaan untuk mengisi acara penyambutan tamu-tamu penting Kabupaten Deli Serdang dan Provinsi Sumatera Utara.
 - d. Melakukan pendataan terhadap lembaga kebudayaan yang masih eksis.
 - e. Mengusulkan lembaga-lembaga kebudayaan untuk mendapatkan bantuan dari Kementerian Pendidikan dan kebudayaan, Kementerian Pariwisata Ekonomi Kreatif, dan Pemkab Deli Serdang.
 - f. Menyalurkan bantuan Sembako dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, dan Pemkab Deli Serdang kepada lembaga-lembaga kebudayaan.
2. Program dan kegiatan kebudayaan merupakan pelaksanaan MISI Keempat Pemerintah Kabupaten Deli Serdang, yaitu: Meningkatkan tatanan kehidupan masyarakat yang religius, berbudaya dan berakhlakul karimah, berlandaskan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta dapat memelihara kerukunan, ketenteraman dan ketertiban. Kebijakan Pemkab. Deli Serdang terhadap kebudayaan selama dua tahun terakhir sebagai berikut:
 - a. Merumuskan dan menetapkan pokok-pokok pikiran kebudayaan daerah (PPKD).

- b. Mendata sanggar, lembaga adat dan situs serta cagar budaya yang ada di Deli Serdang, tercatat sebagai berikut: (i) 144 sanggar; (ii) 15 lembaga adat, dan (iii) 168 situs cagar budaya.
- c. Mensinergikan antara visi pemerintah Kabupaten Deli Serdang yaitu “Deli Serdang Yang Maju, Sejahtera Dengan Masyarakatnya Yang Relegius dan Rukun Dalam Kebhinekaan” dengan potensi masyarakat di bidang kebudayaan.
- d. Berupaya untuk mensosialisasikan visi Kabupaten Deli Serdang khususnya “Rukun Dalam Kebhinekaan” dalam berbagai bentuk antara lain mengkaitakan setiap tema pertunjukan kebudayaan yang diselenggarakan.
- e. Memberi ruang dengan menyediakan sarana dan prasaran pendukung terhadap praktisi kebudayaan untuk mengekspresikan “Rasa Kebudyaannya” dengan menyiapkan lokasi sarana olahraga, seni dan budaya.
- f. Melaksanakan berbagai *event* skala kabupaten seperti festival seni, seni budaya, pertunjukan seni budaya, lomba seni budaya, dan pengiriman tim seni budaya pada even tingkat provinsi, nasional dan internasional.
- g. Melakukan pendataan kebudayaan, melaksanakan pertemuan-pertemuan dengan tokoh budaya dalam bentuk: diskusi kebudayaan, FGD kebudayaan, seminar kebudayaan dan *workshoop* kebudayaan.
- h. Menyediakan media interaksi dalam bentuk digitalisasi seperti : *website, instagram, Facebook, youtube* dan media sosial lainnya.
- i. Mendorong kelompok-kelompok budaya untuk dapat berekspresi dengan memfasilitasinya dalam bentuk penyediaan tempat untuk berekspresi seperti adanya kawasan seni dan budaya antara lain ; *amphi theather, museum dan wisata kuliner.*
- j. Mendorong pimpinan lembaga budaya untuk bersinergi kepada pemerintah desa dalam pemanfaatan alokasi dana desa sehingga dapat terfasilitasi.
- k. Menyediakan ruang untuk berekspresi bagi para praktisi budaya pada acara-acara ceremonial seperti : penyambutan, dan pelepasan tamu-tamu penting kabupaten dan provinsi.
- l. Melakukan pembinaan terhadap sumber daya manusia bidang kebudayaan dalam bentuk pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan oleh kementerian.
- m. Memfasilitaasi sertifikasi tim ahli cagar budaya di Kabupaten Deli Serdang.
- n. Memfasilitasi penyelenggaraan kegiatan-kegiatan yang bersekala nasional antara lain, Pekan Kebudayaan Daerah (PKD) , Pekan Kebudayaan Nasional (PKN), Jalur Rempah, Indosiana film, Indosiana.
- o. Mempersiapkan peraturan/surat-surat edaran terkait dengan eksistensi tenaga kebudayaan di daerah, agar tidak di perkenankan untuk mutasi dalam waktu terlalu pendek.
- p. Meningkatkan kesejahteraan pelaku praktisi kebudayaan, baik di pemerintahan maupun di masyarakat.

Permasalahan, Temuan dan Tantangan

1. Kurangnya pengetahuan, pemahaman dan peran serta masyarakat terkait dengan budaya benda dan tidak benda.
2. Masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap peninggalan sejarah, berupa cagar budaya untuk dilestarikan seperti, misalnya persoalan tanah untuk ganti rugi lahan yang di dalamnya terkandung cagar budaya.

3. Terkesan mulai lunturnya nilai-nilai budaya di tengah masyarakat disebabkan oleh persaingan untuk memenuhi kebutuhan hidup.

D. Bidang Pariwisata

Identifikasi Data dan Informasi Pariwisata

1. Beberapa langkah upaya Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Deli Serdang untuk memastikan penyelenggaraan pariwisata selama masa pandemi COVID-19 tetap berjalan sebagai berikut:
 - a. Pemda kabupaten Deli Serdang telah menerbitkan Surat Edaran Bupati Deli Serdang Nomor 556/257 tanggal 21 Januari 2021 tentang Pembatasan Kegiatan Masyarakat pada Usaha Pariwisata Dalam Rangka Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Kabupaten Deli Serdang;
 - b. Pemda kabupaten Deli Serdang membangun sarana dan prasarana TIC sebagai media promosi kepariwisataan Kabupaten Deli Serdang;
 - c. Pemda kabupaten Deli Serdang membangun sarana tempat pemasaran kuliner Deli Serdang;
 - d. Pemda kabupaten Deli Serdang mendorong para pengusaha pariwisata agar menerapkan protokol kesehatan dan memberikan pelayanan maksimal terhadap para pengunjung.
2. Pemberian dan penerapan sertifikat Cleanlines, Health Safety and Environment (CHSE) kepada dunia usaha hotel dan restoran telah diterapkan di Kabupaten Deli Serdang guna meningkatkan kepercayaan masyarakat untuk berwisata.
3. Pemda Kabupaten Deli Serdang telah meminta bantuan hibah pariwisata, kepada Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (surat No.556/3792, tanggal 17 November 2020) dengan pertimbangan Kab. Deli Serdang adalah pintu masuk internasional dan pendukung utama Destinasi Super Prioritas Danau Toba.
4. Pemda Kabupaten Deli Serdang dan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif telah mengimplementasikan program dan kegiatan pengembangan Destinasi dan SDM melalui dana DAU dan DAK untuk meningkatkan pengembangan sarana dan prasarana pariwisata.
5. Guna mendukung pengembangan dunia pariwisata di Kabupaten Deli Serdang, Pemda telah menerbitkan beberapa regulasi antara lain:
 - a. Perbub Nomor 025 tahun 2018 Tentang Tata Cara Penetapan Desa Wisata di Kabupaten Deli Serdang ditujukan untuk menargetkan setiap kecamatan harus memiliki minimal 1 Desa Wisata;
 - b. Surat Keputusan nomor : 2135/DISPORABUDPAR /DS/2018 tentang penetapan kawasan desa wisata desa Denai Lama Kecamatan Pantai Labu, Desa Rumah Liang Kecamatan STM Hulu dan Desa Daluh 10 A Kecamatan Tanjung Morawa menjadi Pilot Project Desa Wisata di Kabupaten Deli Serdang;
 - c. SK nomor 670 tahun 2019 tentang pembentukan tim penataan kawasan perkotaan di kecamatan Kabupaten Deli Serdang, ditujukan untuk melakukan penataan kawasan prioritas perkotaan;
 - d. Surat Keputusan Kepala Dinas nomor 526 tahun 2020 tentang penetapan kawasan Desa Wisata Pematang Johar Kecamatan Labuhan Deli menjadi Desa Wisata di Kabupaten Deli Serdang.

6. Pemda Kabupaten Deli Serdang telah berkolaborasi dengan pemangku pariwisata untuk mengembangkan industri pariwisata di Kabupaten Deli Serdang antara lain dengan:
 - a. Politeknik Pariwisata Medan yaitu kerjasama dalam hal pengembangan SDM melalui praktik kerja bagi mahasiswa Poltekpar dan juga penyediaan narasumber kegiatan pelatihan SDM;
 - b. ASPPI (Asosiasi Pengusaha Pariwisata Indonesia) Sumut, yaitu kerjasama pemberian rekomendasi ijin usaha perseorangan sebagai syarat dalam pengembangan kawasan hutan untuk pengembangan pariwisata;
 - c. ASTINDO (Asosiasi Travel Indonesia) Sumut yaitu berkolaborasi melakukan promosi usaha pariwisata di Kabupaten Deli Serdang;
 - d. FAJI (Federasi Arung Jeram Indonesia) yaitu berkolaborasi dalam pengembangan usaha wisata arung jeram yang ada di Kabupaten Deli Serdang dengan menjual paket wisata arung jeram;
 - e. MASATA Kab. Deli Serdang (Masyarakat Sadar Wisata) berkolaborasi dalam pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan desa wisata.

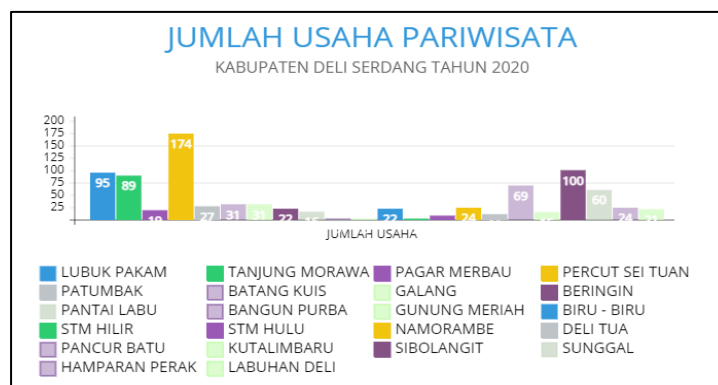
7. Disporabudpar Kabupaten Deli Serdang pada tahun 2020 melakukan beberapa program untuk pengembangan sumber daya manusia pelaku pariwisata yaitu :
 - a. Kegiatan pelatihan Tata Kelola Usaha Pariwisata yang dilaksanakan pada bulan September tahun 2020 selama 3 hari dengan jumlah peserta 40 orang dimana peserta berasal dari kelompok masyarakat yang berada di kawasan objek wisata seperti kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) serta pengelola usaha pariwisata. Pelatihan ini dilaksanakan menggunakan DAK Non Fisik yang bertujuan melatih para peserta dalam menata usaha sehingga usaha pariwisata dapat menjadi lebih baik dan tertata dengan rapi sistem pengelolaannya.
 - b. Kegiatan Pelatihan *Homestay* yang dilaksanakan pada bulan Oktober tahun 2020 dengan jumlah peserta 40 orang dan peserta berasal dari kelompok masyarakat yang berada di kawasan objek wisata seperti Pokdarwis serta pengelola usaha pariwisata. Pelatihan ini dilaksanakan menggunakan DAK Non Fisik yang bertujuan untuk meningkatkan jumlah usaha pariwisata di lokasi objek wisata sehingga tercipta *homestay* yang nyaman yang dikelola secara profesional di kawasan tersebut.
 - c. Kegiatan pelatihan Pokdarwis yang dilaksanakan pada bulan September tahun 2020 dengan jumlah peserta sebanyak 180 orang dilaksanakan selama 6 hari dengan jumlah peserta 30 orang perhari. Kegiatan ini bertujuan untuk mensosialisasikan saptapersona dan juga pemahaman tugas dan fungsi dari Pokdarwis. Pelatihan ini menggunakan dana Anggaran Daerah Kabupaten Deli Serdang tahun 2020.

8. Berikut 10 destinasi favorit masyarakat di Kabupaten Deli Serdang:
 - a. Taman Buah Lubuk Pakam
 - b. Danau Linting
 - c. Wisata Sawah Pantang Johar
 - d. Museum Deli Serdang
 - e. Desa Wisata Denai Lama
 - f. Wisata Sawah Punden Rejo
 - g. Wisata Bunga Madirsan

- h. Taman Wisata Alam (TWA) Sibolangit
 - i. Le Hu Garden
 - j. Central Park and Zoo Resort Pancur Batu
9. Pemda Kabupaten Deli Serdang juga sedang mengembangkan Agrowisata Sibolangit dan Buluh Awar dengan potensi kawasan wisatanya berupa Sejarahaj Jalur Perlanja Sira, potensi hasil pertanian berupa gula aren, padi, duku, dan durian.

Permasalahan, Temuan dan Tantangan

1. Akibat mewabahnya pandemi COVID 19 seluruh program kegiatan yang anggarannya dari DAU dan DAK Pengembangan Sarana dan Prasarana Pariwisata ditunda pelaksanaannya, dan dialihkan untuk menanggulangi penyebaran wabah pandemi COVID-19
2. Beberapa lokasi destinasi wisata yang mulai beroperasi di Kabupaten Deli Serdang di tengah-tengah pandemi COVID 19 dipenuhi wisatawan lokal dan nusantara yang mengakibatkan protokol kesehatan COVID 19 sulit diterapkan;
3. Perkembangan pariwisata dan pada masa COVID -19 pada umumnya memprihatinkan dan sangat terpuruk. Hotel-hotel okupansinya tidak lebih dari 20%, demikian juga dengan lokasi daya tarik wisata, restoran dan rumah makan termasuk kafe hanya dikunjungi 20% sampai dengan 25 % dari kapasitas tersedia;
4. Turunnya okupansi hotel, rumah makan dan kunjungan wisata di Kabupaten Deli Serdang menyebabkan, adanya pembatasan jam kerja dan penggiliran bekerja kepada karyawan, sehingga banyak karyawan yang dirumahkan atau di PHK;
5. Selama COVID 19 belum ada hotel berbintang yang ditutup permanen, tetapi dari sisi keuangan pada umumnya hotel sudah mengeluh atas beban biaya operasionalnya;
6. Jumlah usaha pariwisata yang terdampak pandemi COVID-19 sejumlah kurang lebih 800 berbagai jenis usaha pariwisata di 22 Kecamatan sebagaimana tergambar dalam gambar berikut:



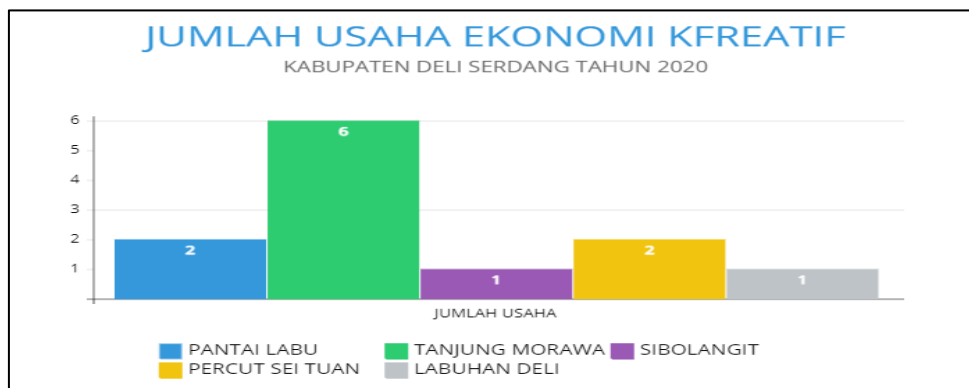
7. Permasalahan mendasar lain dalam pengembangan pariwisata di Kabupaten Deli Serdang antara lain, (1) daya tarik wisata belum dikelola secara profesional, (2) rendahnya peran masyarakat dan dunia usaha dalam pengembangan kepariwisataan, (3) kualitas sumber daya manusia pengelola kepariwisataan rendah dan perlu ditingkatkan, (4) atraksi wisata dan budaya yang kurang dan perlu ditingkatkan kualitasnya, (5) minimnya pemanfaatan media sosial dalam mempromosikan lokasi-lokasi destinasi pariwisata, dan (6) minimnya sarana prasarana pendukung pariwisata di lokasi pariwisata.

8. Status legalitas pengelolaan beberapa kawasan objek pariwisata merupakan kawasan konservasi ataupun kawasan hutan lindung sehingga masyarakat atau kelompok masyarakat harus mengantongi izin pengelolaan sebagai lokasi pariwisata.

E. Bidang Ekonomi Kreatif

Identifikasi Data dan Informasi Ekonomi Kreatif

1. Langkah upaya Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Deli Serdang dalam mengembangkan Ekonomi Kreatif selama masa pandemi COVID-19 yaitu memfasilitasi lembaga yang bergerak di bidang ekonomi kreatif untuk meningkatkan frekuensi pertunjukan dan pameran produk dengan menggandeng pengusaha, seperti usaha kriya, *fashion*, kuliner dalam setiap acara;
2. Produk ekonomi kreatif unggulan Kabupaten Deli Serdang berupa:
 - a. Kripik Ubi Lutvi
 - b. Krupuk Ikan Patin
 - c. The Serai
 - d. Sambal MC22
 - e. Aneka Langgam Souvenir
 - f. Ana Ruby Mada
 - g. Mozaik Lidi Art
 - h. Liza Mangrove
 - i. Iwa Raki Tenun
 - j. Sembekan Dua Coffe
3. Terdapat 12 usaha ekonomi kreatif di Kabupaten Deli Serdang yang tersebar di 5 wilayah Kecamatan yaitu di Pantai Labu, Sibolangit, Labuhan Deli, Percut Sei Tuan, Tanjung Morawa tergambarkan dalam data berikut:



No.	Kecamatan	Ekonomi Kreatif
1	Pantai Labu	PASAR KAMU (Pekan Sarapan Karya Anak Muda)
2		PTPN (Pekan Tradisional Paloh Naga)
3	Sibolangit	Gula merah dan gula semut
4	Labuhan Deli	Batik sawah Pematang Johar
5	Percut Sei Tuan	Batik mangrove Tanjung Rejo
		Kuliner mangrove Tanjung Rejo
6	Tanjung Morawa	Gerabah Bangunsari (6 lokasi)

Permasalahan, Temuan dan Tantangan

1. Pelaku ekonomi kreatif di Kabupaten Deli Serdang belum pernah mendapatkan sosialisasi Undang-undang No. 24 Thn 2019 tentang Ekonomi Kreatif;
2. Kegiatan ekonomi kreatif di Kabupaten Deli Serdang pada masa pandemi COVID-19 telah membuka dan baraktifitas kembali tapi belum pulih sepenuhnya setelah beberapa saat memilih untuk menutup tempat usahanya di awal masa pandemi.

F. Bidang Pembinaan Pemuda

Identifikasi Data dan Informasi Kepemudaan

1. Beberapa langkah upaya Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Deli Serdang dalam penyelenggaraan pembinaan pemuda dan olahraga selama masa pandemi COVID-19 sebagai berikut:
 - a. Penghentian sementara semua kegiatan kepemudaan yang tidak sesuai dapat menerapkan protokol kesehatan COVID 19;
 - b. Melakukan pendataan terhadap lembaga kepemudaan yang masih eksis;
 - c. Melakukan pembinaan pada lembaga kepemudaan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan organisasi kepemudaan;
 - d. Dukungan kegiatan kepemudaan selama masa pandemi COVID-19 diarahkan untuk mendukung pemberian sembako, dan bantuan alat kesehatan kepada masyarakat seperti masker, dan *hand sanitizer*.
2. Pembinaan kepemudaan yang dilakukan oleh Pemda Kabupaten deli Serdang dalam bentuk pelayanan melalui Diklat Strategi Bela Negara, kompetisi dan apresiasi, peningkatan dan perluasan memperoleh peluang kerja, memberi kesempatan yang sama kepada pemuda untuk berekspresi, beraktivitas dan berorganisasi serta melaksanakan penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan potensi pemuda.

Permasalahan, Temuan dan Tantangan

1. Tantangan pembinaan pemuda yang dihadapi Pemda Kabupaten Deli Serdang antara lain, (1) keterlibatan penyalahgunaan narkoba, (2) nasionalisme yang tergerus, dan munculnya sikap-sikap individualisme dan materialisme, (3) tingginya angka putus sekolah, dan (4) angka pengangguran tinggi dan kurangnya lapangan kerja;
2. Pembinaan organisasi pemuda di Kabupaten Deli Serdang mengalami kendala sebagai berikut:
 - a. Belum tertibnya administrasi organisasi kepemudaan yang dilaporkan secara periodik ke Dinas (OPD) terkait;
 - b. Sebagian besar organisasi pemuda belum memiliki kantor sekretariat;
 - c. Kurangnya komunikasi pengurus organisasi pemuda dengan Dinas (OPD) terkait.

G. Bidang Pembinaan Olahraga

Identifikasi Data dan Informasi Olahraga

1. Beberapa langkah upaya Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Deli Serdang dalam penyelenggaraan pembinaan pemuda dan olahraga selama masa pandemi COVID-19 sebagai berikut:
 - a. Membatalkan semua kompetisi-kompetisi olahraga;

- b. Tidak mengadakan kegiatan olahraga baik yang bersifat rekreasi, tradisional dan prestasi;
 - c. Penyerahan apresiasi terhadap atlet berprestasi kurun waktu 9 September 2019 s/d. 8 September 2020 secara bergelombang untuk menghindari kerumunan;
 - d. Mendorong agar Cabor dapat meningkatkan prestasi melalui kegiatan pembinaan dan pelatihan dengan menerapkan protokol kesehatan;
 - e. Memfasilitasi sarana dan prasarana olahraga yang dibutuhkan masyarakat;
 - f. Menggalakkan olahraga masyarakat dan olahraga tradisional.
2. Dukungan anggaran pembinaan olahraga di kabupaten Deli Serdang tiga tahun terakhir masih sangat minim di bawah 1 % dari APBD, hal tersebut tergambar dalam tabel berikut ini:

ANGGARAN	T A H U N		
	2018	2019	2020
APBD Kab. DS	3.733.345.654.763	4.016.480.823.937	3.620.159.870.638
DISPORABUDPAR	28.318.929.151	25.486.239.920	17.534.127.035
BID. OLAHRAGA	8.424.437.278	6.660.854.422	1.897.493.300

Perbandingan (%) Anggaran Bidang Olahraga terhadap APBD dan Anggaran

TAHUN	Bidang Olahraga terhadap		Dinas PORABUDPAR terhadap APBD Kab. Deli Serdang
	APBD Kab. Deli Serdang	Dinas PORABUDPAR	
2018	0,23%	29,75%	0,76%
2019	0,17%	26,14%	0,63%
2020	0,19%	10,82%	0,48%

Dinas PORABUDPAR, serta Dinas PORABUDPAR terhadap APBD.

TAHUN	NILAI PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	KETERANGAN
2018	8.424.437.278	6.418.580.685	Ada pengurangan anggaran
2019	6.660.854.422	5.091.551.815	Ada pengurangan anggaran
2020	1.879.493.300	785.363.200	Realokasi dan refocusing untuk penanganan COVID 19

3. Meskipun dengan dukungan anggaran yang minim, Pemda Kabupaten Deli Serdang telah berperan aktif dalam pembinaan dan peningkatan prestasi olahraga. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan capaian prestasi atlet asal Kabupaten Deli Serdang di tingkat provinsi, nasional dan internasional selama tiga tahun terakhir ini.
4. Berikut cabang olahraga unggulan Kabupaten Deli Serdang:

No.	Cabang Olahraga	No.	Cabang Olahraga	No.	Cabang Olahraga
1	Pencak silat	7	Bola voli	13	Panahan
2	Karate	8	Sepak bola	14	Renang
3	Taekwondo	9	Atletik	15	Drumband
4	Tarung Derajat	10	Angkat Besi	16	Billyard
5	Gulat	11	Bulutangkis	17	Catur
6	Tinju	12	Tenis Meja	18	NPC

5. Provinsi Sumatera Utara telah ditunjuk sebagai lokasi pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI bersama Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Lokasi pembangunan Sport Center untuk mendukung pelaksanaan PON XXI akan dibangun di Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang dengan luas Kawasan 322.89 Ha dan akan menghabiskan anggaran sebanyak Rp. 13,4 T. Kompleks *Sport Centre* memiliki konsep kelapa sawit ini selain terdapat venue olahraga, juga akan dilengkapi area publik, *water park*, hospital, *Islamic Centre*, *shopping area*, *Convention Centre*, ruang teather, pedestrian dan lain-lain. Berikut rencana desain lokasi *sport centre* yang telah memasuki tahap tender:



Permasalahan, Temuan dan Tantangan

1. Dampak dari pandemi COVID-19 membuat program pembinaan olahraga prestasi tidak berjalan maksimal, hal ini disebabkan oleh batalnya kompetisi yang telah terjadwal. Ada juga pengunduran jadwal kompetisi sehingga mengganggu program latihan yang telah disusun.
2. Tantangan pembinaan olahraga yang dihadapi Pemda Kabupaten Deli Serdang antara lain, (1) prestasi olahraga belum merata di semua cabang olahraga, (2) rendahnya peran masyarakat dan dunia usaha dalam pengembangan olahraga, dan (3) kondisi keuangan daerah yang tidak dapat memenuhi kebutuhan pelaksanaan kegiatan disebabkan pandemi COVID 19.

H. Bidang Perpustakaan

Identifikasi Data dan Informasi Perpustakaan

1. Pada masa New normal, pelayanan perpustakaan kembali dibuka sesuai dengan petunjuk protokol kesehatan dari Tim Gugus Tugas COVID-19 dengan menyediakan fasilitas yang mendukung untuk pelaksanaan protokol kesehatan, yaitu fasilitas cuci tangan, pengecekan suhu tubuh, selalu menyarankan untuk memakai masker, menjaga jarak tempat duduk, membatasi jumlah pengunjung dan waktu kunjungan di perpustakaan;
2. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Deli Serdang selama masa pandemi COVID-19 tetap melakukan pembinaan perpustakaan yang ada di Kabupaten Deli Serdang seperti perpustakaan desa dan perpustakaan sekolah dengan cara sistem daring;
3. Guna menambah koleksi naskah kuno yang dimiliki oleh Perpustakaan Daerah, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Deli Serdang telah meminta kepada masyarakat untuk menyerahkan kepemilikan naskah-naskah kunonya agar dipelihara oleh perpustakaan atau museum daerah;
4. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Deli Serdang telah menyurati seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), sekolah, Kepala Desa dan Lurah agar di setiap unit kerja membuat pojok baca dan perpustakaan yang diharapkan bisa menjadi pendorong minat baca bagi masyarakat;
5. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Deli Serdang telah mengupayakan melakukan pembangunan gedung perpustakaan yang lokasinya strategis dengan dukungan bantuan dari Perpustakaan Nasional RI;
6. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Deli Serdang dalam meningkatkan literasi/minat baca di masa Pandemi Covid – 19 ini, telah mengupayakan adanya e-book digital dengan memanfaatkan aplikasi i-Deli Serdang. Ebook yang ada di dalam aplikasi I-Deli Serdang masih berisi ebook gratis dan masih belum berkualitas, karena belum tersedianya anggaran untuk pembelian hak paten ebook yang lebih berkualitas
7. Perpustakaan Daerah Kabupaten Deli Serdang telah mewakili Provinsi Sumatera Utara dalam Lomba Bercerita dan Pengelolaan Perpustakaan;
8. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Deli Serdang menjadi perpustakaan terbaik dalam audit kearsipan 2020 se Sumatera Utara
9. Beberapa upaya-upaya terobosan yang telah dilakukan oleh Perpustakaan Daerah Kabupaten Deli Serdang untuk meningkatkan layanan perpustakaan kepada masyarakat:
 - a. Menggunakan aplikasi Inlilite yang merupakan perangkat lunak (software) aplikasi otomasi perpustakaan secara *online* yang dapat juga dimanfaatkan oleh pemustaka;
 - b. Bekerjasama dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dalam hal pemanfaatan NIK untuk pendaftaran keanggotaan perpustakaan daerah;
 - c. Mengadakan kegiatan bimbingan pelatihan tentang kegiatan penyelenggaraan perpustakaan;
 - d. Memberikan bantuan berupa koleksi buku, fasilitas layanan pendukung (mobil dan motor keliling), meubelair dan TIK.
 - e. Memperbanyak pojok baca digital di berbagai tempat.

Permasalahan, Temuan dan Tantangan

1. Kurangnya bahan bacaan yang baru dan bermutu. Khususnya bacaan buku terbitan baru;
2. Kurangnya bahan bacaan yang aplikatif di perpustakaan desa dan sekolah;
3. Lokasi Perpustakaan Daerah milik Kabupaten Deli Serdang yang kurang strategis;
4. Dukungan anggaran dari Pemda yang belum memadai untuk proses kegiatan penyelenggaraan perpustakaan secara maksimal;
5. Kurangnya tenaga ahli (pustakawan yang memiliki ijazah ilmu perpustakaan) di Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Deli Serdang.

III. PEMBAHASAN

A. Bidang Pendidikan dan Kebudayaan

Dalam pertemuan, Pemerintah Daerah Kabupaten Deli Serdang, serta para pemangku kepentingan pendidikan dan kebudayaan menyampaikan masukan dan pandangan terkait kebijakan, program serta kegiatan, yaitu: Meminta Pemerintah cq Kemendikbud RI agar Pemerintah Daerah diberikan kebebasan menentukan zonasi PPDB, mengingat kondisi sosial masyarakat dan geografis Sumatera Utara khususnya Kabupaten Deli Serdang. Hal ini diperkuat oleh permintaan Gubernur Sumatera Utara yang disampaikan dalam pertemuan.

B. Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Dalam pertemuan dan kunjungan lapangan, Pemerintah Daerah Kabupaten Deli Serdang, serta para pemangku kepentingan pariwisata dan ekonomi kreatif menyampaikan masukan dan pandangan terkait kebijakan, program serta kegiatan, yaitu

1. Pemda Kabupaten Deli Serdang dalam kesempatannya menyampaikan beberapa hal sebagai berikut:
 - a. Meminta dukungan Pemerintah merealisasikan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Kab. Deli Serdang tahun 2016-2025 yang diharapkan mampu mendukung pengembangan dan pembangunan kepariwisataan Kab. Deli Serdang;
 - b. Meminta dukungan kepada Kemenparekraf RI untuk merealisasikan target 1 Kecamatan minimal memiliki 1 Desa Wisata untuk mendukung keberadaan Danau Toba sebagai Destinasi Super Prioritas
 - c. Meminta dukungan pengembangan dan pemasaran produk-produk lokal unggulan ekonomi kreatif yang saat ini masih bersumber dari swadaya mandiri dan dukungan dari dana desa (Bumdes).
2. Deputi Bidang Sumber Daya dan Kelembagaan Kemenparekraf RI, Wisnu Bawa Tarunajaya, MM, menyampaikan:
 - a. Kemenparekraf RI selalu mendukung Provinsi Sumatera Utara menjadi pusat wisata *quality tourism* terbaik dengan Danau Tobanya sebagai destinasi wisata super prioritas khususnya pada peningkatan sumber daya pengelola wisata di bidang *packaging* dan *marketing* wisata dengan pemanfaatan media digital.
 - b. Prinsip "*What kind of activity, what do we see, what we will buy, and what do we learn*" pada pengembangan destinasi wisata harus menjadi perhatian dalam peningkatan layanan jasa pariwisata

C. Bidang Pemuda dan Olahraga

Dalam pertemuan dan kunjungan lapangan, Pemerintah Daerah Kabupaten Deli Serdang, serta para pemangku kepentingan olahraga menyampaikan masukan dan pandangan terkait kebijakan, program, kegiatan, yaitu:

1. Menpora RI Zainuddin Maliki dalam kesempatannya memberikan masukan dan arahan sebagai berikut:
 - a. Pemerintah berkomitmen untuk mulai menata pembinaan dan pengembangan olahraga sebagaimana arahan Presiden RI untuk mulai menata dan me-review secara total ekosistem pembinaan olahraga nasional;
 - b. Dalam upaya melakukan perbaikan sistem pembinaan olahraga nasional, Pemerintah bersama Komisi X DPR RI telah melakukan upaya revisi UU Sistem Keolahragaan Nasional (SKN), dan juga telah melakukan perumusan serta uji publik Grand Design Pembinaan Olahraga Nasional;
 - c. Presiden RI telah mengarahkan agar pembangunan sentra-sentra pembinaan olahraga nasional tidak lagi berpusat di Ibukota tapi mulai dikembangkan berbasis daerah baik di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota berdasarkan potensi daerah masing-masing;
 - d. Meminta agar dalam pembinaan olahraga juga disertai dengan keberadaan *sport science*.
2. Gubernur Sumatera Utara meminta agar Pemerintah dan Komisi X DPR RI mendukung secara politik dan anggaran pembangunan Sport Center Sumatera Utara yang akan dibangun sebagai persiapan pelaksanaan PON XXI 2024 di Sumatera Utara, termasuk dukungan untuk merenovasi Stadion Teladan di Medan;
3. Pemda Kabupaten Deli Serdang memberikan masukan berupa:
 - a. Meminta dalam revisi UU Nomor 3 tahun 2005 Tentang Sistem Keolahragaan Nasional pada Pasal 71 ayat 2 yaitu *Dana keolahragaan yang dialokasikan dari pemerintah daerah dapat diberikan dalam bentuk hibah sesuai dengan peraturan perundang-undangan*, mempertegas adanya kebijakan dukungan pengalokasian hibah dapat dilakukan secara terus menerus;
 - b. Pemda Kabupaten Deli Serdang meminta dukungan rehabilitasi Stadion Bahruddin Siregar agar memiliki kelayakan fasilitas sebagai pusat pengembangan olahraga prestasi dan masyarakat di Kabupaten Deli Serdang;
 - c. Akibat kebijakan larangan penggunaan APBD untuk pembinaan klub sepakbola, Klub Sepak Bola PSDS mengalami kesulitan pendanaan termasuk untuk mendapatkan sponsor dari pengusaha/swasta.

D. Bidang Perpustakaan

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dalam kesempatannya menyampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Meminta dukungan Perpustakaan RI membantu pengembangan aplikasi i-Deli Serdang agar bisa berfungsi dengan baik dan terintegrasi dengan aplikasi iPusnas milik Perpustakaan RI;
2. Meminta dukungan buku-buku yang berkualitas baik berupa buku cetak atau ebook untuk penguatan dan peningkatan minat literasi masyarakat.

E. Tanggapan dan Pandangan Komisi X DPR RI

Tim Kunjungan Kerja Komisi X DPR RI melakukan pertemuan dengan Gubernur Sumatera Utara, Bupati Deli Serdang, Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Olahraga dan Pemuda, juga dihadiri oleh para pemangku kepentingan pariwisata, ekonomi kreatif, olahraga dan pemuda dilanjutkan dengan kunjungan lapangan ke Sanggar Lingkaran yang dikelola oleh masyarakat Desa Denai Lama dan Desa Agrowisata Paloh Naga. Dari pertemuan dan kunjungan lapangan, terdapat beberapa hal yang menjadi catatan dan mendapatkan respon dari Tim Kunjungan Kerja Komisi X DPR RI antara lain:

1. Dalam bidang pendidikan, Tim Kunjungan Kerja Komisi X DPR RI menekankan agar pelaksanaan pembelajaran jarak jauh (PJJ) mengombinasikan pembelajaran daring dan luring serta mendorong inovasi pembelajaran yang dapat diimplementasikan selama masa pandemi maupun saat *new normal*. Selain itu, berharap Pemda Deli Serdang dapat mengatasi permasalahan putus sekolah yang persentasenya masih tinggi. Tim Kunjungan Kerja Komisi X DPR RI mengapresiasi upaya Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan Pemkab Deli Serdang untuk meningkatkan kesejahteraan guru honorer melalui peningkatan honor per jam mengajar meskipun jumlahnya masih dibawah UMR regional.
2. Dalam bidang pariwisata, Tim Kunjungan Kerja Komisi X DPR RI menekankan agar pengelolaan destinasi pariwisata, khususnya keberadaan desa-desa wisata yang telah dikembangkan oleh masyarakat di Kabupaten Deli Serdang dikoordinasikan secara intensif dengan Pemerintah Provinsi Sumatera dan Pemerintah Pusat. Selain itu, Tim Kunjungan Kerja Komisi X DPR RI juga mengharapkan agar potensi-potensi pariwisata yang ada di Deli Serdang dan Sumatera Utara umumnya dikembangkan dalam rangka mendukung Danau Toba sebagai Destinasi Pariwisata Super Prioritas. Hal lain yang menjadi perhatian adalah skema pemberian dana desa langsung ke BUMDES selaku pengelola Desa Wisata Denai Lama, dinilai cukup efektif mempercepat pembangunan sarana dan prasarana Desa Wisata Denai Lama dan berdampak memajukan perekonomian masyarakat di sekitar pesisir Pantai Labu.
3. Dalam bidang ekonomi kreatif, Tim Kunjungan Kerja Komisi X DPR RI mengapresiasi Kabupaten Deli Sedang dalam mengembangkan produk-produk hasil alamnya sebagai sebagai komoditi unggulan ekonomi kreatif dan mengharapkan agar dalam pengembangan dan pemasaraannya memanfaatkan marketing berbasis digital. Selain itu, perlunya sinergi yang lebih maksimal dengan para pemangku kepentingan ekonomi kreatif dengan pelaku industri, perdagangan, dan perbankan untuk dukungan permodalan;
4. Dalam bidang pemuda dan olahraga, tim kunjungan kerja Komisi X DPR RI mengharapkan agar Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan Kabupaten Deli Serdang segera menyiapkan langkah-langkah strategis terhadap persiapan pelaksanaan PON XXI tahun 2024 baik dari kesiapan infrastruktur dan sumber daya manusia. Komisi X DPR RI berharap penunjukan Provinsi Sumatera Utara sebagai tempat pelaksana pelaksanaan PON membawa gairah baru pembinaan olahraga prestasi dan masyarakat di Sumatera Utara;
5. Dalam bidang perpustakaan, tim kunjungan kerja Komisi X DPR RI mengharapkan agar Pemda Kabupaten Deli Serang dan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara memperhatikan dan mendukung keberadaan perpustakaan desa atau yang perpustakaan yang dikelola masyarakat secara pribadi yang tersebar di seluruh daerah.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan deskripsi di atas, dari berbagai pertemuan dan kunjungan lapangan yang telah dilakukan, Tim Kunjungan kerja Komisi X DPR RI ke Kabupaten Deli Serdang dapat merumuskan kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam bidang pendidikan, Kabupaten Deli Serdang mengupayakan pelaksanaan pembelajaran jarak jauh (PJJ) mengombinasikan pembelajaran daring dan luring serta membuat inovasi pembelajaran yang dapat diimplementasikan selama masa pandemi maupun saat *new normal*. Selain itu, berharap Pemda Deli Serdang akan berupaya mengatasi permasalahan putus sekolah yang persentasenya masih tinggi. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan Pemkab Deli Serdang mengupayakan peningkatan kesejahteraan guru honorer melalui peningkatan honor per jam mengajar meskipun jumlahnya masih dibawah UMR regional.
2. Dalam bidang pariwisata, Kabupaten Deli Serdang telah memiliki Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Kabupaten Deli Serdang tahun 2016-2025 sebagai acuan penyelenggaraan pariwisata. Kabupaten Deli Serdang memiliki destinasi wisata yang potensial, kaya dan beragam, baik wisata alam, pertanian, budaya, maupun buatan berupa desa wisata yang juga telah ditopang dengan keberadaan industri ekonomi kreatif yang menghasilkan produk-produk unggulan berkualitas ekspor bersumber dari hasil budaya dan alamnya. Di antaranya destinasi wisata potensial dan unggulan yaitu Taman Buah Lubuk Pakam, Danau Linting, Wisata Sawah Pantang Johar, Museum Deli Serdang, Desa Wisata Denai Lama, Wisata Sawah Punden Rejo, Wisata Bunga Madirsan, Taman Wisata Alam (TWA) Sibolangit, Le Hu Garden dan Central Park and Zoo Resort Pancur Batu. Namun pengelolaan bidang pariwisata di Kabupaten Deli Serdang masih menemukan beberapa kendala dan permasalahan seperti (1) daya tarik wisata belum dikelola secara profesional, (2) rendahnya peran masyarakat dan dunia usaha dalam pengembangan kepariwisataan, (3) kualitas sumber daya manusia pengelola kepariwisataan rendah dan perlu ditingkatkan, (4) atraksi wisata dan budaya yang kurang dan perlu ditingkatkan kualitasnya, (5) minimnya pemanfaatan media sosial dalam mempromosikan lokasi-lokasi destinasi pariwisata, dan (6) minimnya sarana prasarana pendukung pariwisata di lokasi pariwisata. Persoalan mendasar pengelolaan pariwisata di atas semakin diperkuat dengan imbas pandemi COVID-19 yang membuat industri pariwisata dan ekonomi kreatif di Kabupaten Deli Serdang makin terpuruk.
3. Dalam bidang pemuda dan olahraga, Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Deli Serdang telah melakukan pembinaan kepemudaan dan keolahragaan. Khusus pada pembinaan olahraga, pembinaan cabang olahraga prestasi di Kabupaten Deli Serdang sudah berjalan bagus yang ditandai dengan hasil prestasi atlet-atlet Kabupaten Deli Serdang di tingkat provinsi, nasional dan internasional. Namun dalam pembinaan olahraga di Kabupaten Deli Serdang masih menghadapi kendala di antaranya (1) prestasi olahraga belum merata di semua cabang olahraga, (2) rendahnya peran masyarakat dan dunia usaha dalam pengembangan olahraga, dan (3) kondisi keuangan daerah yang tidak dapat memenuhi kebutuhan pelaksanaan kegiatan pembinaan disebabkan pandemi COVID 19. Adapun dari sisi kepemudaan, program pembinaan organisasi kepemudaan di Kabupaten Deli Serdang sudah berjalan bagus namun selama pandemi COVID-19, semua kegiatan dihentikan dan dialihkan pada kegiatan

sosial melibatkan pemuda dalam program-program pencegahan pandemi COVID-19. Tantangan pembinaan pemuda di Kabupaten Deli Serdang di antaranya (1) tingginya keterlibatan penyalahgunaan narkoba, (2) nasionalisme yang tergerus, dan munculnya sikap-sikap individualisme dan materialisme pemuda, (3) tingginya angka putus sekolah, dan (4) angka pengangguran tinggi dan kurangnya lapangan kerja.

4. Dalam bidang Perpustakaan dan Kearsipan secara umum di Kabupaten Gresik berjalan dengan baik dan lancar, dengan adanya 9 perpustakaan desa dan program inovatif lain yang telah dilakukan untuk mendukung peningkatan minat baca dan indeks literasi masyarakat. Selama masa pandemi COVID-19, pelayanan perpustakaan dilakukan dengan protokol kesehatan dan memaksimalkan layanan digital. Pengelolaan perpustakaan dan kearsipan di Kabupaten Deli Serdang masih terdapat beberapa permasalahan, yaitu masih rendahnya tingkat partisipasi masyarakat untuk terlibat dan mengunjungi perpustakaan, kurangnya SDM perpustakaan yang berkompeten baik di perpustakaan umum maupun perpustakaan sekolah, belum optimalnya perpustakaan digital (aplikasi i-Deli Serdang) dan terbatasnya anggaran yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

V. REKOMENDASI

Berdasarkan deskripsi yang telah disampaikan di atas, tim kunjungan kerja Komisi X DPR RI ke Kabupaten Deli Serdang merekomendasikan hal-hal sebagai berikut:

A. Bidang Pendidikan dan Kebudayaan

1. Komisi X DPR RI mendorong Kemendikbud RI untuk melakukan sosialisasi kebijakan pendidikan secara komprehensif dan pendampingan kepada Pemerintah Daerah, sehingga kebijakan dapat diimplementasi sesuai dengan kondisi daerah, khususnya kebijakan PPDB, agar Pemda diberikan kebebasan menentukan zonasinya sesuai dengan kondisi sosial masyarakat dan geografisnya.
2. Komisi X DPR RI mendorong Kemendikbud RI untuk mendukung upaya Pemerintah Daerah melakukan transformasi pendidikan dengan memperbanyak pelatihan IT atau pelatihan mengelola pembelajaran daring, bagi pendidik dan tenaga kependidikan.
3. Komisi X DPR RI mendorong Kemendikbud RI untuk melakukan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan PIP dan menyiapkan skema penyelesaiannya, mengingat masih ada temuan masalah yang berulang seperti penerima PIP yang tidak tepat sasaran dan dana belum tersalurkan ke sekolah / peserta didik.

B. Bidang Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif (Ekraf)

1. Komisi X DPR RI mendorong Kemenparekraf RI, Kemendikbud R. Kementan RI dan Kemendes PPDT RI untuk mendukung upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Deli Serdang mengembangkan potensi wisatanya, khususnya pada jenis wisata alam, wisata edukasi-budaya, dan agro-wisata atau desa wisata.
2. Komisi X DPR RI mendorong Kemenparekraf RI untuk melakukan upaya percepatan pemulihan industri pariwisata di Sumatera Utara dan langkah-langkah strategis percepatan pembangunan infrastruktur penopang serta peningkatan investasi untuk Danau Toba sebagai destinasi pariwisata super prioritas.

3. Komisi X meminta kepada Kemenparekraf RI untuk mengembangkan potensi desa-desa wisata dalam upaya memperkenalkan budaya tradisi bangsa dan meningkatkan ekonomi masyarakat desa, khususnya membuat skema penyaluran dana langsung ke desa wisata.
4. Komisi X DPR RI meminta Kemenparekraf RI untuk mempertegas posisi Ekraf dengan pariwisata dan sektor lainnya, mengingat Ekraf tidak hanya terkait dengan pariwisata, tapi juga terkait dengan permodalan, pemasaran produk ekonomi kreatif.

C. Bidang Olahraga, Pemuda dan Pramuka

1. Komisi X DPR RI mendorong Kemenpora RI untuk segera merumuskan dan menerbitkan Grand Design Pembinaan Olahraga dengan memperhatikan aspek kebijakan pembinaan atlet pada usia dini, peta potensi pembinaan olahraga berbasis daerah, dukungan infrastruktur olahraga dan anggaran pembinaan olahraga di daerah.
2. Komisi X DPR RI mendorong Kemenpora RI dan K/L terkait untuk melakukan upaya percepatan pembangunan fasilitas sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan PON XXI tahun 2024 di Sumatera Utara.
3. Komisi X DPR RI Meminta kepada Kemenpora RI juga menyiapkan *road map* pengelolaan dan pembinaan pemuda untuk menghadapi tantangan bonus demografi pada 2030.

D. Bidang Pepustakaan

1. Komisi X DPR RI mendorong Perpustakaan Nasional RI meningkatkan sinergitas dengan Kemendes PPDT RI dalam pemenuhan pelayanan perpustakaan desa seperti perlunya bantuan DAK untuk pembangunan perpustakaan desa agar masyarakat di desa dan pedalaman mendapatkan akses buku beragam dan berkualitas serta dapat terlayani dengan baik.
2. Komisi X DPR RI mendorong Perpustakaan Nasional RI untuk bisa melakukan terobosan strategis pelayanan masyarakat di masa Pandemi COVID 19 dengan memanfaatkan berbasis digital.

VI. PENUTUP

Demikian laporan Kunjungan Kerja Komisi X DPR RI pada Reses Masa Persidangan III Tahun Sidang 2020-2021 ke Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara, disusun sebagai bentuk pertanggung jawaban dan bahan kajian dalam pengambilan kebijakan.

Jakarta, 22 Februari 2021

**Ketua Tim/
Wakil Ketua Komisi X DPR RI**

Ttd.

Dr. Ir. Hetifah Sjaifudian, MPP
A-338